

PERUBAHAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

372/HM.02/7326/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 22/HM.02-Kpt/7326/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa untuk mengisi/melengkapi Tim Badan Koordinasi Kehumasan oleh karena pengalihan tugas Personil Tim Badan Koordinasi Kehumasan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 22/HM.02-Kpt/7326/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 22/HM.02-Kpt/7326/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); *Peraturan* Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 372/HM.02/7326/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 22/HM.02-Kpt/7326/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, bertugas sebagai berikut: 1. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan tugas; 2. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat Daerah; 3. Merencanakan dan melakukan kegiatan Kehumasan; 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2021.
 - Keputusan KPU Nomor 372/HM.02/7326/2021 Tahun 2021 Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 22/HM.02-Kpt/7326/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 terkait dengan perubahan Tim Bakohumas sebagai berikut:1. Nurwahidin Mattjirinnah digantikan oleh Mega Yabes Ratte Lembang sebagai Plt. Kasubag Teknis dan Parmas; 2 Menghapus Dewi Mayangsari karena di mutasi ke KPU RI digantikan oleh Nurwahidin Mattjirinnah sebagai Staf Teknis dan Hupmas, dan; 3. Menambahkan Efraim Payung sebagai Staf.
 - Lampiran 1 halaman.